

SKRIPSI

DINAMIKA PARTAI POLITIK DALAM MEMUTUSKAN DUKUNGAN PADA CALON BUPATI TUNGGAL PILKADA KABUPATEN BONE 2018

Diajukan sebagai salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik pada Program Studi Ilmu Politik Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin



OLEH :

MUHAMMAD ZAKY IRGIAWAN

E041191079

DEPARTEMEN ILMU POLITIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

2023

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**DINAMIKA PARTAI POLITIK DALAM MEMUTUSKAN DUKUNGAN
PADA CALON BUPATI TUNGGAL PILKADA KABUPATEN BONE 2018**

Disusun dan Diajukan Oleh :

MUHAMMAD ZAKY IRGIWAN

E041191079

Telah dipertahankan di hadapan Tim Panitia Penguji Skripsi dalam rangka penyelesaian Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin dan dinyatakan telah memenuhi syarat.

Pada Tanggal 14 Bulan Juni 2023

Menyetujui,

Pembimbing Utama


Prof. Dr. Phil. Sukri, S. IP., M. Si.
NIP. 19750818 200801 1 008

Pembimbing Pendamping


Haryanto, S. IP., M. A.
NIP. 19861008 201903 1 009

Mengetahui,

Ketua Departemen Ilmu Politik




Drs. H. Andi Yakub, M.Si., Ph.D.
NIP. 19621231 199003 1 023

HALAMAN PENERIMAAN

SKRIPSI

**DINAMIKA PARTAI POLITIK DALAM MEMUTUSKAN DUKUNGAN
PADA CALON BUPATI TUNGGAL PILKADA KABUPATEN BONE 2018**

Disusun dan Diajukan Oleh :

MUHAMMAD ZAKY IRGIAWAN

E041191079

Dinyatakan telah memenuhi syarat oleh panitia ujian skripsi
Program Studi Ilmu Politik, Departemen Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

UNIVERSITAS HASANUDDIN

Menyetujui,

PANITIA UJIAN

Ketua : Prof. Dr. Phil. Sukri, S. IP., M. Si. (.....)

Sekretaris : Haryanto, S. IP., M. A. (.....)

Anggota : Drs. H. Andi Yakub, M. Si., Ph. D. (.....)

Anggota : Dian Ekawaty, S. IP., M. A. (.....)

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Zaky Irgiawan

NIM : E041191079

Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)

Program Studi : Ilmu Politik

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul "**Dinamika Partai Politik Dalam Memutuskan Dukungan Pada Calon Bupati Tunggal Pilkada Kabupaten Bone 2018**" adalah benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain.

Makassar, 8 Juni 2023



Muhammad Zaky Irgiawan

ABSTRAK

Muhammad Zaky Irgiawan – E041191079. Dinamika Partai Politik Dalam Memutuskan Dukungan Pada Calon Bupati Tunggal Pilkada Kabupaten Bone 2018. Di bawah bimbingan Sukri sebagai Pembimbing Utama dan Haryanto sebagai Pembimbing Pendamping.

Pilkada dalam politik memberikan ruang kepada seluruh elemen untuk berkontribusi secara aktif salah satunya pemilihan bupati di suatu daerah. Pada tahun 2018 di Sulawesi Selatan khususnya di Kabupaten Bone telah diselenggarakan Pilkada yang diikuti oleh pasangan Andi Fahsar M. Padjalangi dan Ambo Dalle sebagai pasangan tunggal yang meraih suara 232.955 suara yang berarti mengungguli kotak kosong dengan selisih 96.420 suara. Dalam pengusungan pasangan tunggal tersebut tidak lepas dari adanya peran partai politik, seperti pada fungsi partai politik yaitu sebagai rekrutmen politik serta sudah menjadi tugas sebuah partai politik untuk lebih jeli dan memutuskan kandidat yang cocok menjadi sebuah representasi partai politik, sehingga penelitian ini melihat dari aspek desentralisasi bagaimana dinamika partai politik yang terjadi dalam memutuskan dukungan pada calon bupati tunggal pada Pilkada Kabupaten Bone tahun 2018.

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif untuk menggambarkan dinamika partai dalam memutuskan dukungan pada calon bupati tunggal Pilkada Kab. Bone 2018 menggunakan pendekatan Institusionalisme baru dan dua konsep, yaitu desentralisasi partai politik dan pertarungan elit partai politik. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara terhadap beberapa informan yang berpengaruh dalam pengusungan calon bupati Kabupaten Bone, serta melakukan observasi terjun langsung ke lokasi penelitian dan menggunakan studi kepustakaan sebagai data sekunder.

Hasil penelitian ini menghasilkan dua dinamika, yaitu dinamika internal dan dinamika eksternal pada partai politik. Pada dinamika internal alasan partai politik untuk mengusung yaitu melihat secara realistis elektabilitas, pasangan tersebut memenuhi syarat, dan secara ketokohan partai politik melihat pasangan Tafaddal memenuhi kriteria masing-masing partai politik. Sedangkan pada dinamika eksternal melihat dari hubungan partai politik yang tidak berjalan efektif dan hubungan calon bupati tunggal dan partai pengusung yang memiliki hubungan yang baik dengan para petinggi partai pengusung sehingga menguntungkan keduanya untuk mencapai kepentingan kedua belah pihak.

Kata Kunci : Dinamika, Pilkada, Partai Politik, Kotak Kosong.

ABSTRACT

Muhammad Zaky Irgiawan – E041191079. The Dynamics Of Political Parties In Deciding Support For A Single Regent Candidate For The Bone District Election 2018. Supervised by Sukri and Haryanto.

Pilkada in politics provides space for all elements to actively contribute, including the election of a regent in an area. In 2018 in South Sulawesi, especially in Bone Regency, a local election was held which was attended by the pair Andi Fahsar M. Padjalangi and Ambo Dalle as the only pair who won 232,955 votes, which means outperforming the empty box with the difference of 96,420 votes. The role of a single pair cannot be separated from the role of political parties, such as the function of political parties, namely political recruitment, and a political party must be more observant and decide on suitable candidates to become a representation of political parties, so this research looks at the aspect of decentralization, to see how the dynamics of political parties that occur in deciding support for a single regent candidate in the 2018 Bone Regency Pilkada.

The research method used is qualitative to describe the dynamics of the party in deciding support for a single regent candidate for the District Election. Bone 2018 uses a new theory of institutionalism and three concepts, namely the decentralization of political parties and the struggle for political parties elites. The data collection technique used was interviewing several influential informants in nominating candidates for regent of Bone Regency, making direct observations at the research location and using literature studies as secondary data.

The results of this study produce two dynamics, namely internal and external dynamics in political parties. In the internal dynamics, the reason for the political parties to carry it is to see electability realistically, the pair fulfils the requirements, and political parties see the Tafaddal pair fulfilling the criteria of each political party. Whereas in the external dynamics, it can be seen from the relationship between political parties that are not running effectively and the relationship between the single regent candidate and the supporting party, which has a good relationship with the top officials of the supporting party so that it benefits both parties to achieve the interests of both parties.

Key Words: Dynamics, Pilkada, Political Parties, Empty box election.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillahirabbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan berkah dan karunia setelah melalui penantian panjang dan melewati berbagai perjuangan untuk melawan masa-masa jenuh serta pergantian judul dan topik berkali-kali, pada akhirnya saya dapat menyelesaikan skripsi penulis yang berjudul **“Dinamika Partai Politik Dalam Memutuskan Dukungan Pada Calon Bupati Tunggal Pilkada Kabupaten Bone 2018”**. Tidak lupa shalawat serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada baginda nabi besar Muhammad SAW beserta para pengikutnya. Skripsi ini saya tulis sebagai salah satu syarat wajib bagi mahasiswa Strata Satu (S-1) pada Program Studi Ilmu Politik, Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, untuk menyelesaikan studi guna mendapatkan gelar Sarjana Ilmu Politik (S. IP)

Pertama dan yang paling utama skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orangtua yang sangat berjasa di kehidupan penulis yaitu **ibu Ir. Hj. Hasrianti Samad** dan **Bapak Safri Abdullah S.H, M.H** yang telah menjadi orangtua terhebat dan selalu memberi penulis dukungan doa, perhatian, kasih sayang, motivasi dan materi yang tak terhingga.

Terimakasih tak terhingga kepada Dosen Pembimbing saya Bapak **Prof. Dr. Phil. Sukri, S. IP., M. Si.** dan Bapak **Haryanto. S. IP., M. A.** yang telah membimbing

saya dengan sabar dan ikhlas dari awal menulis skripsi hingga akhir masa penulisan.

Skripsi ini saya selesaikan tidak terlepas dari dukungan serta bantuan berbagai pihak, oleh sebab itu dengan penuh rasa hormat dan rasa bangga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Rektor Universitas Hasanuddin, Bapak **Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M. Sc.**, beserta jajaran yang telah memberikan penulis kesempatan belajar di Universitas Hasanuddin. Tak lupa kepada Rektor Universitas Hasanuddin 2018-2022 **Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M. A.** Yang telah menerima penulis sebagai mahasiswa Universitas Hasanuddin.
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Bapak **Prof. Dr. Phil. Sukri, S. IP., M. Si.** sekaligus pembimbing utama dan dosen saya yang telah memberikan saya kesempatan untuk belajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin serta memberikan banyak ilmu dan pemikiran dalam menyelesaikan skripsi saya.
3. Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Ibu **Dr. Hasniati, S. Sos., M. Si.** Beserta jajaran staf akademik yang telah memperlancar berbagai urusan administratif selama saya menjadi mahasiswa Fisip Unhas.

4. Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Alumni, Bapak **Dr. M. Iqbal Sultan, M. Si.** beserta jajaran staf.
5. Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Bidang Kemitraan, Riset, dan Inovasi, Bapak **Prof. Dr. Suparman Abdullah, M. Si.** beserta jajaran staf.
6. Ketua Departemen Ilmu Politik, Bapak **Drs. Andi Yakub, M. Si., Ph. D.** yang telah membantu kelancaran administrasi akademik sekaligus menjadi dosen penguji saya.
7. Dosen sekaligus pembimbing ketiga Ibu **Dian Ekawaty, S.IP., M.A.**, yang telah memberikan banyak masukan sekaligus menjadi dosen penguji pada perjalanan penulisan skripsi saya.
8. Bapak Ibu Dosen lainnya di Departemen Ilmu Politik : Bapak **Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si., (Alm.)** Bapak **Prof. Dr. Basir Syam, M.Ag.**, Bapak **Dr. Muhammad Saad, M.A.**, Ibu **Dr. Ariana, S.IP., M.Si.**, Ibu **Dr. Sakinah Nadir, S. IP., M. Si.**, Bapak **Andi Naharuddin, S.IP., M.Si.**, Bapak **Dr. Muh. Imran, S.IP., M.Si.**, Ibu **Ummi Suci Fathia Bailusy, S.IP., M.IP.**, dan Bapak **Zulhajar, S.IP., M.A.**, yang telah memberikan banyak sekali ilmu pengetahuan dan mengajarkan kepada saya apa arti politik sebenarnya selama masa perkuliahan.

9. Staf Administrasi Departemen Ilmu Politik, Bapak **Syamsuddin, S. T.**, dan Ibu **Musriati, S. E.** yang telah membantu memperlancar saya dalam berbagai urusan administrasi perkuliahan selama menjadi mahasiswa Departemen Ilmu Politik.
10. Terima kasih kepada Bupati Bone Bapak **Dr. H. Andi Fahsar Mahdin Padjalangi, M.Si.** dan Wakil Bupati Bone Bapak **H. Ambo Dalle** yang telah bersedia menyediakan waktunya untuk membantu memberikan data untuk menyelesaikan skripsi penulis.
11. Terima kasih kepada adik saya yang merepotkan **Adinda Nafirah** terimakasih sudah membantu saya, semoga senantiasa kuat mengarungi perkuliahannya agar kelak bisa menjadi Sarjana Hukum yang bijak di masa depan.
12. Terima kasih kepada Keluarga Besar **Hj. Samad** alias Keluarga Serigala yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu namanya. Terima kasih telah memberi dukungan sehingga saya bisa mendapatkan gelar sarjana. *Tuo Malampe Sunge'ta.*
13. Terima kasih kepada Kakanda Advokat **Muhammad Khairum** yang telah banyak membantu bersedia menemani saya meneliti 11 Partai Politik di Kabupaten Bone. Tanpa beliau mungkin saya akan tersesat di bumi Arung Palakka. Sukses segala kehidupannya.

14. Terima kasih kepada saudara seperjuangan, mentor dan calon dosen Bapak **Aqshal Andhana** dan Ibu **Aisyah Achmad** yang sudah sabar mengajarkan dan setia menjadi tempat saya berkonsultasi ria sehingga saya mampu menyelesaikan skripsi ini. Seluruh hal baik saya doakan untuk kalian.
15. Terima kasih kepada saudara-saudari **Hibernasi Media** kesayangan saya **Saddam Anhar, Mario Aiman, Ria Magfira, Tarisa Rahmadani, Citra Amri** dan **Rifyal Ramadhan**. Tanpa Hibernasi dan kalian mungkin saya tidak bisa berada di titik ini dan semoga seluruh hal baik yang kalian impikan segera terwujud.
16. Terima kasih kepada Seluruh teman – teman **Ilmu Politik angkatan 2019** dan **Saudara-Saudari Seperjuangan Diplomasi 2019**, yang telah membersamai saya selama menjadi mahasiswa ilmu politik, memberi banyak warna di arc perkuliahan saya meskipun pernah *timeskip* oleh pandemi. Tidak pernah ada penyesalan memilih Politik sebagai pilihan kedua, Semoga apa yang kalian cita-citakan segera terwujud dan gelar sarjana ilmu politiknya bermanfaat di masa yang akan datang.
17. Terima kasih kepada seluruh keluarga besar **Himapol FISIP UNHAS**, yang telah memberikan wadah pembelajaran di luar kelas perkuliahan dan tempat untuk berkarya serta pengalaman selama berkuliah. Spesial untuk Inti **Pak Dewan Bisma, Plum. Creator, Tiwi, Rista, Dewang, Puang Uppi, Rahmet**.
Himapolku Himapolmu Himapol Kita Semua.

18. Terima kasih kepada Seluruh teman-teman **KKNT PUPR Unhas Gelombang 108 Desa Bontoala** yang juga memberikan pengalaman berharga selama masa KKN.
19. Terima kasih kepada Seluruh Keluarga Suafoto yang telah memberikan saya semangat, kritik, cinta dan tekanan dalam menyelesaikan skripsi saya saudara **Indigenous Muhammad S. IP, Darina, Athila, Fadel Pababari, Christian, Ilfiana, Uceng** dan Warga Rumah Lamdoek yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu.
20. Terima kasih Kepada **Om Dul** alias **Pak Andi** yang sudah bersedia mengantar saya selama penelitian di kabupaten Bone.
21. Kepada **perempuan baik di kota kembang** yang telah setia menemani sedari awal perkuliahan hingga detik ini, mendengarkan keluh kesah selama masa penulisan skripsi ini. seluruh doa baik saya panjatkan untukmu, namamu abadi tertulis dalam karya dan ingatan. Terima Kasih.
22. Terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi, berdoa, memberi perhatian, dukungan secara langsung maupun tidak langsung. Terimakasih karena telah menyisihkan sebagian dari waktu dan tenaga kalian untuk saya.
23. Kepada **saya sendiri**, tidak berhenti ucapkan puji syukur karena berhasil melewati tahap awal ini. Semoga kita bisa bertahan dan menjadi orang yang berguna bagi agama dan bangsa ini.

Saya selaku penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini masih sangat banyak terdapat kekurangan karena keterbatasan saya sebagai manusia biasa. Oleh sebab itu, maka kepada para pembaca yang budiman saya selalu terbuka akan kritik, koreksi, serta saran yang bersifat membangun demi perbaikan dan peningkatan kualitas skripsi ini.

Makassar, 8 Juni 2023

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes that form a stylized representation of the author's name.

Muhammad Zaky Irgiawan

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	II
HALAMAN PENERIMAAN	III
LEMBAR PERNYATAAN	IV
ABSTRAK	V
ABSTRACT	VI
KATA PENGANTAR	VII
DAFTAR ISI	XIV
DAFTAR LAMPIRAN	1
DAFTAR TABEL	2
BAB I	3
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Tujuan Penelitian	12
1.4 Manfaat Penelitian	13
1.4.1 Manfaat Akademik	13
1.4.2 Manfaat Praktis	13
BAB II	14
2.1 Penelitian Terdahulu	14
2.2 Pendekatan Institusionalisme Baru	19
2.3 Pelembagaan Partai Politik	22
2.3.1 Konsep Desentralisasi Partai Politik	24
2.3.2 Konsep Pertarungan Elit Partai Politik	26
2.4 Kerangka berpikir	29
2.5 Skema pemikiran	31
BAB III	32
3.1 Jenis dan Tipe Penelitian	32
3.2 Lokasi Dan Objek Penelitian	33

3.3 Jenis Data	33
3.4 Teknik Pengumpulan Data	34
3.5 Informan Penelitian	35
3.6 Teknik Analisis Data	37
BAB IV	39
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	39
4.1.1 Letak, Luas dan Batas Wilayah Kabupaten Bone	39
4.1.2 Kependudukan	40
4.2 Gambaran Umum Partai Politik dan DPRD Kabupaten Bone.....	41
4.2.1 Gambaran Umum Partai Politik Kabupaten Bone.....	41
4.2.2 DPRD Kabupaten Bone.....	44
4.2.2.1 Struktur dan Kelengkapan DPRD Kabupaten Bone.....	45
4.2.2.2 Alat kelengkapan DPRD	46
BAB V	47
5.1 Dinamika Internal Partai Politik dalam memutuskan dukungan calon Bupati tunggal.....	47
5.1.1 Awal mula Terjadinya Koalisi	47
5.1.2 Alasan Mendukung Calon Bupati Tunggal	51
5.1.3 Dinamika Keputusan Internal Partai Politik	57
5.2 Dinamika Hubungan antara Partai Politik Pengusung dalam memutuskan dukungan kepada calon Bupati Tunggal	60
5.2.1 Dinamika Hubungan Antar Partai Politik pengusung.....	60
5.2.2 Dinamika hubungan antara Calon Bupati tunggal dan Partai Politik	64
BAB VI	68
6.1 Kesimpulan	68
6.1.1 Dinamika Internal Partai Politik dalam memutuskan Calon Bupati Tunggal.....	68
6.1.2 Dinamika hubungan antara partai politik pengusung dalam memutuskan dukungan pada calon tunggal	71
6.2 Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN.....	80

DAFTAR LAMPIRAN

Dokumentasi 1. Wawancara langsung bersama Dr. Drs. H. Andi Fahsar Mahdin Padjalangi M.Si. (Bupati Bone) pada tanggal 5 April 2023.....	81
Dokumentasi 2. Wawancara langsung bersama Drs. H. Ambo Dalle, M.M. (Wakil Bupati Bone) pada tanggal 2 April 2023.....	82
Dokumentasi 3. Wawancara langsung bersama H. Firman Batari, S.H, M.H (Sekretaris Partai Golkar Bone dan Dewan Penasihat tim Sukses Koalisi Tafaddal) pada tanggal 29 Maret 2023.....	83
Dokumentasi 4. Wawancara langsung bersama Rusdi (Ketua DPC PKB Bone) pada tanggal 30 Maret 2023.....	84
Dokumentasi 5. Wawancara langsung bersama Andi Susanto Baso Samad (Ketua DPC HANURA Bone) pada tanggal 29 Maret 2023.....	85
Dokumentasi 6. Wawancara langsung bersama Bahtiar Malla (Ketua DPC PDIP Bone) pada tanggal 29 Maret 2023.....	86
Dokumentasi 7. Wawancara langsung bersama Suardi (Sekretaris Partai Demokrat Bone) pada tanggal 30 Maret 2023.....	87
Dokumentasi 8. Wawancara langsung bersama Syam Nur (Sekretaris Partai Gerindra Bone) pada tanggal 30 Maret 2023.....	88
Dokumentasi 9. Wawancara langsung bersama Andi Wahyudin Taqwa (Ketua Partai Amanat Nasional Bone) pada tanggal 30 Maret 2023.....	89
Dokumentasi 10. Wawancara langsung bersama Junaid (Sekretaris Partai Nasdem Bone) pada tanggal 31 Maret 2023.....	90
Dokumentasi 11. Wawancara langsung bersama Ali Imran (Ketua DPD PKS Bone) pada tanggal 31 Maret 2023.....	91
Dokumentasi 12. Wawancara via <i>Video Call</i> bersama Syaifullah Latif Manyala (Ketua DPC PBB Bone) pada tanggal 31 Maret 2023.....	92
Dokumentasi 13. Wawancara langsung bersama Khairul Amran (Ketua DPC PPP Bone) pada tanggal 1 April 2023.....	93

DAFTAR TABEL

Tabel 4.2.1.....	43
Tabel 4.2.2.1.....	45

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) adalah pemilihan yang dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administratif setempat yang telah memenuhi syarat. Kepala daerah dan Wakil kepala daerah yang dimaksud mencakup, Gubernur dan Wakil Gubernur untuk provinsi, Bupati dan wakil bupati untuk kabupaten, Walikota dan Wakil Walikota untuk kota yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik dan perseorangan. Hal tersebut diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. Pilkada dalam politik memberikan ruang kepada seluruh elemen untuk berkontribusi secara aktif. Adapun tujuan dari penyelenggaraan Pilkada serentak merupakan suatu upaya untuk memperkuat sistem presidensial, sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam menyalurkan hak politiknya.¹

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Pemilihan Bupati sebagai kepala daerah sangatlah penting karena Bupati sebagai pemegang kekuasaan otonomi daerah. Masyarakat harus turut andil dalam pilkada untuk mewujudkan sifat demokratis diluar dari kewajiban sebagai warga negara yang baik. Peranan Partai politik tidak lepas dari pemilihan kepala daerah. Partai politik menjadi kendaraan bagi para aktor politik untuk terjun pada pemilihan daerah. Dalam iklim politik yang penuh dengan persaingan terbuka dan transparan, kontestan membutuhkan suatu metode yang dapat memfasilitasi mereka dalam memasarkan inisiatif politik, gagasan politik, isu politik, ideologi partai, karakteristik pemimpin partai dan program kerja partai kepada masyarakat. Di era Demokrasi seperti saat ini, sudah menjadi keharusan seorang kontestan pasangan calon kepala daerah memiliki strategi dan kemampuan untuk memikat dan meyakinkan seluruh elemen pemilih utamanya Partai pengusung. Calon kepala daerah dan partai memiliki hubungan yang saling membutuhkan satu sama lain. Calon kepala daerah membutuhkan Partai pengusung untuk maju dalam kontestasi politik begitupun partai politik sebaliknya yang membutuhkan calon untuk menjalankan visi dan misi partai politik dan tentunya untuk mendapatkan kekuasaan di daerah tersebut.

Demokrasi dikenal dengan adanya sebuah kompetisi dimana sebuah jalan yang harus kita tempuh untuk mewujudkan kepentingan dengan hasil

akhir meraih kemenangan. Didalam suatu kompetisi munculnya satu pasangan calon, dipandang sebagai sebuah anomali Demokrasi. Maka dihadirkannya lawan tanding dari pasangan calon tunggal atau yang dikenal dengan istilah Kotak Kosong. Kotak Kosong tidak mewakili nama tokoh ataupun berafiliasi dengan partai politik manapun, tetapi dibuat oleh peraturan perundang-undangan sebagai jalan keluar atas adanya kebuntuan kontestasi pasangan calon maupun kandidat. Pemilihan Kepala daerah melawan kotak kosong wajib diberi perhatian lebih dimana pasangan calon tunggal harus memiliki strategi khusus dalam menghadapi Kotak Kosong yang dimulai dari proses tahapan awal kontestasi bagaimana Calon Bupati tunggal menggaet dukungan mayoritas para Partai pengusung hingga akhir penghitungan suara dan begitupun para Partai pengusung yang mencari tokoh berpengaruh untuk dijadikan calon kuat dalam kontestasi.

Sulawesi Selatan (disingkat Sulsel) adalah sebuah Provinsi di Indonesia yang terletak di bagian selatan Pulau Sulawesi. Ibukota Provinsi Sulawesi adalah kota Makassar. Dari 24 Kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan, Kabupaten Bone yang merupakan salah satu daerah otonom di Provinsi adalah kabupaten terluas ketiga di Sulawesi Selatan. Dengan kabupaten yang jumlah penduduknya tertinggi ketiga (setelah Makassar dan Gowa) di Provinsi Sulawesi Selatan. Dari seluruh daerah di Provinsi Sulawesi

Selatan (Sulsel) yang menggelar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2018, terdapat 1 kota dan 2 kabupaten yang hanya diikuti oleh satu pasangan calon yaitu Kota Makassar, Kabupaten Enrekang dan Kabupaten Bone. Banyak tokoh maupun Aktor Politik yang berasal dari Kabupaten Bone, salah satunya adalah H. Andi Fahsar M. Padjalangi.

H. Andi Fahsar M. Padjalangi adalah Bupati Bone terpilih yang sudah memasuki masa jabatan selama dua periode. Pada tahun 2013 hingga 2018, Andi Fahsar M. Padjalangi sudah menjadi Bupati Bone, lalu Kembali terpilih dengan periode 2018 hingga 2023. Untuk periode 2018-2023, ia didampingi wakilnya, Ambo Dalle. Jauh sebelum dilantik menjadi Bupati Bone, Andi Fahsar M. Padjalangi sudah pernah menjadi Wakil Bupati Bone pada periode 2003 hingga 2008 mendampingi H. Andi Muhammad Idris Galigo. Sebelum terjun ke dalam dunia Politik, ia pernah menjadi Mantri Polisi Pamong Praja kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone dan Camat Kecamatan Cina Kabupaten Bone. Andi Fahsar M. Padjalangi merupakan calon bupati tunggal pada Pilkada 2018 Kabupaten Bone. Hasilnya, paslon Tafaddal meraih 232.955 suara atau menguasai 63,05% suara. Sementara kolom kosong

136.535 atau 36,95%. Tafaddal mengungguli kolom kosong dengan selisih 96.420 suara.²

Sepanjang sejarah pentas Demokrasi pemilihan kepala daerah Kabupaten Bone, belum ada satupun pasangan calon (paslon) yang maju diusung oleh semua Partai politik di Parlemen (DPRD) Bone, Sulawesi Selatan.³ Hal ini menjadi sebuah pertanyaan apa yang Pasangan Tafaddal miliki sehingga seluruh partai mempertimbangkan dan mendukung Pasangan Tafaddal.

Beberapa Studi Terdahulu telah membahas mengenai Dinamika namun dengan fokus yang berbeda. Studi yang dilakukan oleh Siti Khodijah dan Valina Singka Subekti dengan judul “Dinamika Pembangunan Koalisi Partai Politik Pengusung Calon Tunggal Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2018” mengungkapkan Koalisi Partai Politik yang terbentuk lebih mengarah pada bentuk *Office Seeking* dan pada akhirnya Dinamika koalisi Partai Politik dalam Pilkada Kabupaten Lebak tahun 2018 cenderung bersifat

² Komisi Pemilihan Umum, “*Penetapan Hasil: Pilkada Kabupaten Bone*”, diakses melalui https://datapemilu.kpu.go.id/pilkada2018/hasil/penetapan/t2/sulawesi_selatan/bone pada tanggal 24 November 2022 pukul 02.53 WITA.

³ Abdullah, “*Diusung Semua Partai Di Parlemen Bone, Tafadal Pecahkan Rekor*”, diakses melalui <https://eksposkaltim.com/berita-6929-diusung-semua-partai-di-parlemen-bone-tafadal-pecahkan-rekor.html> pada tanggal 1 Februari 2023 pukul 01.14 WITA.

Pragmatis.⁴ Sopian Ependi Manalu dan Nurul Nurhandjati dengan judul “Dinamika Koalisi Partai Politik dalam Pilkada kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2018” memperlihatkan Pilkada Kabupaten ini Padang Lawas Utara mengarah pada Pragmatisme Politik dimana Bentuk koalisi yang terbangun cenderung mengarah pada Pada *Policy Blind Condition*, di mana kesamaan ideologi dan platform tidak dijadikan sebagai pertimbangan untuk membentuk koalisi. Bangunan Koalisi cenderung bersifat pragmatis, elitis dan lebih condong mengarah ke *Office Seeking*.⁵ Endah Yuli Ekowati dengan judul “Pragmatisme Politik: Antara Koalisi, pencalonan dan Calon Tunggal dalam Pilkada” mengungkapkan bahwa Pragmatisme Politik merupakan suatu keniscayaan di Indonesia, sudah ada dan terus berkembang. Pragmatisme Politik tidak perlu dihindari, hanya saja memerlukan pengelolaan agar tidak menjadi pengganggu bagi keberlangsungan demokrasi di Indonesia.⁶ Mahpudin, Abdul Hamid dan Shanty Kartika Dewi dengan judul “Dinamika Koalisi Partai Politik dalam Pencalonan Kepala Daerah pada Pilkada Kabupaten Banten 2017” mengungkapkan Dinamika Koalisi Partai politik

⁴ Siti Khodijah, Valina Singka Subekti, *Dinamika Pembangunan Koalisi Partai Politik Pengusung Calon Tunggal Pemilihan Kepala Daerah kabupaten Lebak Tahun 2018*, Depok: Universitas Indonesia, 2020. Hal.185.

⁵ Sopian Ependi Manalu, Nurul Nurhandjati, *Dinamika Koalisi Partai Politik Dalam Pilkada Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2018*, Depok: Universitas Indonesia, 2018. Hal.1041.

⁶ Endah Yuli Ekowati, *Pragmatisme Politik: Antara Koalisi, Pencalonan, dan Calon Tunggal dalam Pilkada*, Surabaya: Universitas Airlangga Surabaya, 2019, Hal.32.

dalam pencalonan Kepala Daerah pada Pilkada Banten berada dalam Pusaran Pragmatisme Partai Politik. Koalisi Partai Politik yang terbentuk lebih mengarah pada bentuk *Policy Blind Condition*. Pada Akhirnya dinamika koalisi Partai Politik dalam pencalonan kepala Daerah pada Pilkada Kabupaten Banten 2017 cenderung pragmatis, elitis. Oligarkis dan berorientasi *Office Seeking*.⁷ Maka penulis akan mencoba melihat permasalahan ini dari sisi Dinamika Politik yang berfokus pada Dinamika Internal Partai Politik pengusung dan Dinamika hubungan antara Partai Politik Pengusung melalui pendekatan Institusionalisme baru sehingga memutuskan memberi dukungan kepada Calon Bupati Tunggal Pilkada Kabupaten Bone 2018.

Partai Politik sebagai sarana bagi warga negara yang diorganisasikan untuk tujuan memenangkan kekuasaan di pemerintahan memiliki peran yang sangat vital di dalam kehidupan bernegara. Sesuai salah satu fungsi Partai politik sebagai Rekrutmen Politik dalam proses pengisian jabatan Politik melalui mekanisme Demokrasi, Partai Politik dengan nilai Demokrasi dan rasa tanggung jawab menentukan dan mengusung perwakilan Partai dalam pelbagai cara serta metode masing-masing. Dalam pandangan

⁷ Mahpudin, Abdul Hamid, Shanty Kartika Dewi, *Dinamika koalisi Partai Politik Dalam Pencalonan Kepala Daerah Pada Pilkada Banten 2017*, Riau: Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2018, Hal.130.

Institusionalisme baru melihat bagaimana peran dan institusi saling berinteraksi.⁸ Menjadi tugas sebuah partai melihat dengan jeli dan cermat siapa tokoh atau kandidat yang pantas mewakili mereka dalam Kontestasi perebutan. Dalam memperebutkan serta meraih dukungan masyarakat pasti terjadi dinamika politik untuk mencapai tujuan tersebut Internal maupun eksternal. Konsep Desentralisasi Partai politik melihat bagaimana dinamika yang terjadi di dalam seperti menentukan kandidat bukan hanya diusulkan di tingkat daerah tetapi ternyata harus melalui penentuan pimpinan atau pengurus pusat.

Fungsi Rekrutmen di dalam partai tentu dilakukan untuk mencapai sebuah kemenangan. Dalam merekrut maupun memutuskan dukungan tentu terjadi dinamika dimana sebuah partai sangat berhati-hati dan mempertimbangkan banyak hal. Keputusan dalam menetapkan seseorang untuk dijadikan sebagai kandidat dalam kontestasi tentu didasarkan pada banyak pertimbangan. Semua Partai saling bertarung di arena politik dalam membentuk konstelasi politik serta memperebutkan kekuasaan dan masing-masing bertahan mempertahankan setiap kepentingan-kepentingan mereka. Konsep dinamika didalam pemilu sendiri umumnya selalu berorientasi pada

⁸ Miriam Budiarjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 2008, Hal. 96-97.

kemenangan. Kemenangan yang dimaksud adalah dalam hal memperebutkan kekuasaan dalam pemerintahan dan pada akhirnya berbagai dinamika terjadi dalam pengusungan calon.

Berangkat dari latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk menelaah lebih mendalam tentang Dinamika Internal Partai Politik dan Dinamika hubungan antara para Partai Politik pengusung dalam memutuskan dukungannya kepada calon Bupati pada Pilkada Kabupaten Bone tahun 2018 dengan memformulasikan judul penelitian “Dinamika Partai Politik Dalam Memutuskan Dukungan Pada Calon Bupati tunggal Pilkada Kabupaten Bone 2018”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, serta mengingat luasnya cakupan masalah yang akan diteliti mengenai “Dinamika Partai Politik Dalam Memutuskan Dukungan Pada Calon Bupati Tunggal Pilkada Kabupaten Bone 2018”, maka penulis membatasi rumusan masalah yang akan diteliti menjadi:

1. Bagaimana Dinamika Internal Partai Politik Pengusung dalam memutuskan dukungan kepada Calon Bupati Tunggal?
2. Bagaimana Dinamika Hubungan antara Partai Politik pengusung dalam memutuskan dukungan kepada Calon Bupati Tunggal?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan masalah, maka tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Dinamika Internal Partai Politik Pengusung sehingga memutuskan Mendukung Calon Bupati Tunggal.
2. Untuk Mengetahui Dinamika hubungan antara Partai Politik Pengusung dalam memutuskan mendukung Calon Bupati Tunggal.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademik

- a) Menambah wawasan mahasiswa/i Ilmu Politik dan dapat bermanfaat bagi pengembang ilmu pengetahuan pada umumnya dan bermanfaat bagi pengembang ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Politik.
- b) Dapat dijadikan sebagai sumber atau referensi bagi siapa saja yang ingin melakukan penelitian serupa.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a) Memberikan Informasi kepada Masyarakat untuk menambah wawasan mengenai Kajian Partai Politik.
- b) Bagi peneliti sendiri, hasil penelitian ini menjadi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan dijelaskan tentang hasil penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Peneliti juga akan mengemukakan dan menunjukkan bahwa masalah yang akan diteliti berbeda dan belum pernah diteliti sebelumnya sehingga akan terlihat bahwa posisi penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti berbeda dengan penelitian terdahulu. mengenai teori dan konsep yang erat kaitannya dengan penelitian ini mengenai Dinamika Partai Politik dalam memutuskan dukungan pada Calon Bupati Tunggal Pilkada Kabupaten Bone 2018. Selain itu, bab ini juga memuat mengenai penelitian terdahulu, kerangka berpikir, dan skema pemikiran. Lebih lanjutnya akan dijabarkan sebagai berikut.

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah suatu acuan peneliti untuk membandingkan peneliti dengan hasil peneliti yang pernah diteliti oleh peneliti terdahulu, Penelitian terdahulu menjelaskan tentang beberapa hasil penelitian sebelumnya namun memiliki kesamaan dengan tema dibahas oleh peneliti. Berikut merupakan penelitian-penelitian yang terkait dengan judul penulis sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Khodijah dan Valina Singka Subekti dengan judul penelitian “Dinamika Pembangunan Koalisi Partai Politik Pengusung Calon Tunggal Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2018”. Adapun hasil dari penelitian ini ialah Pada Pilkada Kabupaten Lebak koalisi Partai Politik yang terbentuk lebih mengarah pada bentuk *Office Seeking*. Pada akhirnya, Dinamika koalisi partai politik dalam Pilkada Kabupaten Lebak tahun 2018 cenderung bersifat Pragmatis. Pertama, koalisi tidak memperhatikan kedekatan ideologi Partai, sehingga terlihat adanya dominasi kuat dari Partai-partai kecil ikut berkoalisi. Kedua, Partai tidak memberikan kesempatan dukungan kepada kader internal maupun eksternalnya dengan alasan mempertimbangkan kemenangan secara maksimal dan tidak ingin mengambil risiko jika harus berkontestasi dengan petahana, serta beratnya persyaratan melalui jalur perseorangan yang tidak dapat dipenuhi oleh bakal calon. Ketiga, munculnya calon tunggal di kabupaten Lebak tidak terlepas dari kuatnya dukungan dan ketokohan orang kuat lokal.⁹

⁹ Siti Khodijah, Valina Singka Subekti, *Dinamika Pembangunan Koalisi Partai Politik Pengusung Calon Tunggal Pemilihan Kepala Daerah kabupaten Lebak Tahun 2018*, Depok: Universitas Indonesia, 2020. Hal.185.

2. Penelitian yang dilakukan Sopian Ependi Manalu dan Nurul Nurhandjati dengan judul penelitian “Dinamika Koalisi Partai Politik Dalam Pilkada Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2018”. Adapun hasil dari penelitian ini memperlihatkan Pilkada Kabupaten Padang Lawas Utara mengarah pada Pragmatisme Politik. Bentuk Koalisi yang terbangun cenderung mengarah pada *Policy blind coalitions*, di mana kesamaan ideologi dan platform tidak dijadikan sebagai pertimbangan untuk membentuk koalisi. Bangunan koalisi cenderung bersifat pragmatis, elitis, dan lebih condong mengarah *Office Seeking*. Partai politik dalam penentuan calon yang akan diusung sangat mempertimbangkan tingkat popularitas dan elektabilitas kandidat yang didapat dari hasil survei. Selain itu, pemberian dukungan partai politik juga dipengaruhi oleh kedekatan dengan elit baik dipusat maupun di daerah. Demi mencapai tujuannya, partai politik yang terdiri dari berbagai variasi ideologi tidak mampu membendung kuatnya keinginan untuk memenangkan kontestasi yang ditopang oleh dukungan.¹⁰
3. Penelitian yang dilakukan oleh Endah Yuli Ekowati dengan judul

¹⁰ Sopian Ependi Manalu, Nurul Nurhandjati, *Dinamika Koalisi Partai Politik Dalam Pilkada Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2018*, Depok: Universitas Indonesia, 2018. Hal.1041.

penelitian “Pragmatisme Politik: Antara koalisi, pencalonan dan Calon tunggal dalam Pilkada”. Adapun hasil penelitian ini yaitu Pragmatisme Politik merupakan suatu keniscayaan di Indonesia, sudah ada dan terus berkembang. Jika sebelumnya partai politik memaksimalkan suara basisnya untuk meraih kemenangan, yang tentunya membutuhkan upaya yang sangat besar. Namun dengan membentuk koalisi yang sifatnya pragmatis dapat membantu proses meraih kemenangan, tetapi tidak membutuhkan upaya yang terlalu besar. Pragmatisme politik terbentuk karena peserta pemilu memiliki motif, kepentingan, dan ambisi untuk memperoleh kemenangan dalam suatu kontestasi. Jika ditinjau berdasarkan uraian diatas bahwa pragmatism politik tidak selamanya berkonotasi negatif. Pragmatisme utamanya menyangkut faktor kemenangan, dimana pragmatisme bersinggungan dengan realita. Pragmatisme dalam mengusung pasangan calon dengan elektabilitas mumpuni tidak selamanya negative, karena elektabilitas dan kualitas bukan dua hal yang berlawanan. Sangat mungkin pasangan calon dengan elektabilitas mumpuni juga memiliki kualitas politik yang bagus. Pragmatisme Politik tidak perlu dihindari, hanya saja memerlukan pengelolaan agar tidak menjadi pengganggu bagi keberlangsungan demokrasi di

Indonesia.¹¹

4. Penelitian yang dilakukan Mahpudin, Abdul Hamid dan Shanty Kartika Dewi dengan judul penelitian “Dinamika Koalisi Partai Politik dalam pencalonan Kepala Daerah pada Pilkada Banten 2017”. Adapun hasil dari penelitian ini Pilkada Banten berada dalam pusaran pragmatism partai politik. Koalisi partai politik yang terbentuk lebih mengarah pada bentuk *Policy blind Coalitions*. Pada akhirnya, dinamika koalisi partai politik dalam pencalonan kepala daerah pada Pilkada Kabupaten Banten 2017 cenderung pragmatis, elitis, oligarkis dan berorientasi *office seeking*. Koalisi tidak ditopang oleh alasan untuk memenuhi kepentingan visi dan ideologi dari partai politik yang tergabung. Koalisi tidak dibangun atas asas keseimbangan sehingga sangat terlihat dominasi kekuasaan berada dan ditentukan oleh partai politik yang lebih besar. Motivasi berkoalisi sangat pragmatis.¹²

Dari keempat penelitian tersebut memiliki relevansi atau persamaan yang terkait dengan penelitian ini yakni secara umum menjelaskan terkait

¹¹ Endah Yuli Ekowati, *Pragmatisme Politik: Antara Koalisi, Pencalonan, dan Calon Tunggal dalam Pilkada*, Surabaya: Universitas Airlangga Surabaya, 2019, Hal.32.

¹² Mahpudin, Abdul Hamid, Shanty Kartika Dewi, *Dinamika koalisi Partai Politik Dalam Pencalonan Kepala Daerah Pada Pilkada Banten 2017*, Riau: Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2018, Hal.130.

Dinamika Politik dan Partai politik. Adapun yang menjadi pembeda dalam penelitian penulis dengan penelitian terdahulu yaitu pada penelitian penulis menganalisis Bagaimana Dinamika Internal partai Politik Pengusung Sehingga memutuskan mendukung Calon Bupati Tunggal serta Bagaimana Dinamika Hubungan antara para Partai Politik pengusung dalam memutuskan mendukung Calon Bupati Tunggal dalam pendekatan Institusionalisme Baru dan dua konsep pelebagaan partai politik yaitu desentralisasi partai politik dan pertarungan elit partai politik.

2.2 Pendekatan Institusionalisme Baru

Institusionalisme baru tidak lepas dari keterkaitan antara perilaku dan masyarakat. Menurut Miriam Budiarjo, Institusionalisme baru merupakan pendekatan kelembagaan yang menjelaskan bagaimana organisasi institusi itu, apa tanggung jawab dari setiap peran dan bagaimana peran dan institusi berinteraksi.¹³ Pendekatan ini mulai tumbuh dan berkembang sejak 1970-an yang merupakan perkembangan dari institusionalisme lama. Pendekatan Institusionalisme baru mencerminkan banyak fitur dari versi lama dari pendekatan institusionalisme untuk memahami politik, di samping juga

¹³ Miriam Budiarjo. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka. 2008. Hal. 96-97.

memberi kemajuan pada studi politik pada sejumlah teori dan analisis empiris.¹⁴

Sebagai sebuah pendekatan dalam studi ilmu politik, Institusionalisme baru memberikan prioritas yang lebih besar terhadap dinamika tentang terbentuknya organisasi dan hubungan antara berbagai elemen atau faksi yang berbeda di dalamnya. Pendekatan ini tidak menyangkal bahwa berkompetisi dapat terjadi di dalam partai politik dalam reformasi internal dan memodifikasi strukturnya. Sekalipun demikian, hal ini menekankan peran pola hubungan intrapartai yang ada dalam menyaring kemungkinan berkumpulnya partai dalam bentuk organisasi tunggal yang optimal¹⁵. Institusionalisme baru juga memperhatikan aspek perilaku individu, gagasan, konflik hingga struktur ekonomi dan politik.¹⁶

Inti dari Institusionalisme Baru dirumuskan oleh Robert E. Goodin sebagai berikut:¹⁷

¹⁴ Ramadhan, Fajar Shodiq dan Tri Hendra. *Pembiaran pada potensi konflik dan kontestasi semu pemilukada kota Blitar: Analisis Institusionalisme Pilihan Rasional*. Indonesia Political Science Review, 1(2). 2016. Hal.140.

¹⁵ Miriam Budiarjo. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2008, Hal.98.

¹⁶ Kosandi, Meidi. Vol.1 No.1, (2015), *Jurnal Politik: Kontestasi Politik dan Perimbangan kekuasaan dalam perumusan dan Implementasi UU MD3 2014*.

¹⁷ Robert E. Goodin *The Theory of Institutional Design*. Cambridge: Cambridge University Press.1996. Hal. 20.

1. Aktor dan kelompok melaksanakan proyeknya dalam suatu konteks yang dibatasi secara kolektif.
2. Pembatasan-pembatasan itu terdiri dari institusi-institusi, yaitu:
 - a. Pola norma dan pola peran yang telah berkembang dalam kehidupan sosial, dan
 - b. Perilaku dari mereka yang memegang peran itu. Peran itu ditentukan secara sosial dan mengalami perubahan terus-menerus.
3. Sekalipun demikian, pembatasan-pembatasan ini dalam banyak hal juga memberi keuntungan bagi individu atau kelompok dalam mengejar proyek mereka masing-masing.
4. Hal ini disebabkan karena faktor-faktor yang membatasi kegiatan individu dan kelompok, juga memengaruhi pembentukan prefensi dan motivasi dari aktor dan kelompok-kelompok.
5. Pembatasan-pembatasan ini mempunyai akar historis sebagai peninggalan dari Tindakan dan pilihan-pilihan masa lalu.
6. Pembatasan-pembatasan ini mewujudkan, memelihara dan memberi peluang serta kekuatan yang berbeda kepada individu dan kelompok masing-masing.

Dalam hal ini, institusionalisme baru dipandang tidak hanya sebatas pada kelembagaan organisasi yang bersifat struktural saja tapi memiliki makna lebih mendalam yang menyentuh aspek aturan main maupun peraturan yang dimiliki oleh suatu Lembaga sehingga bisa langgeng dan bertahan dalam waktu yang lama dan juga kebijakan yang dikeluarkan oleh Lembaga tersebut dalam upaya mempengaruhi masyarakatnya.¹⁸

Dalam Dinamika Partai Politik, Pendekatan Institusionalisme baru melihat adanya aspek-aspek informal yang dapat mempengaruhi keputusan para Partai Politik. Segala upaya untuk yang dilakukan oleh Partai Politik untuk mendapatkan kekuasaannya tidak hanya sekadar melaksanakan peraturan-peraturan yang bersifat normatif tetapi ada juga aspek-aspek diluar peraturan atau informal untuk partai politik dapat menyelipkan kepentingan disetiap keputusannya.

2.3 Pelembagaan Partai Politik

Studi tentang pelembagaan Partai Politik pertama kali diperkenalkan oleh Samuel P. Huntington pada tahun 1976 dalam karyanya yang berjudul "*Political Order in Changing Societies*". Huntington mendefinisikan

¹⁸ Harsono. *Pendekatan Baru Memahami Institusi di Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta. 2012. Hal. 4.

pelembagaan sebagai proses di mana suatu organisasi menentukan tata cara untuk memperoleh nilai baku dan stabil.¹⁹ Lebih dari 20 tahun kemudian Vicky Randall dan Lars Svasand Menemukan Konsep baru mengenai pelembagaan Partai Politik.

Randall dan Svasand memahami Institusional atau pelembagaan sebagai proses pematangan partai politik dalam aspek struktural dan kultural di mana aspek tersebut terwujud dalam pola perilaku serta dalam sikap dan budaya.²⁰ Randall dan Svasand kemudian membagi proses pelembagaan partai politik menjadi dua aspek yaitu aspek internal-eksternal dan aspek struktural-kultural. Bila kedua aspek ini dipersilangkan, hasil persilangan pertama antara aspek internal dan struktural disebut kesisteman (*systemness*). Kedua, persilangan antara aspek internal dan kultural yaitu identitas nilai (*value infusion*). Ketiga, persilangan antara aspek eksternal dan struktural yaitu otonomi sebuah partai dalam pembuatan keputusan (*decisional autonomy*). Keempat, persilangan antara aspek eksternal dan kultural menghasilkan derajat citra partai dimata public (*reification*).²¹ Menurut Huntington dikutip oleh

¹⁹ Samuel P. Huntington, *Tertib Politik di dalam Masyarakat yang sedang Berubah*, Jakarta: CV. Rajawali, 1983. Hal.23.

²⁰ Vicky Randall dan Lars Svasand, *Party Institutionalization in New Democracies*, Party Politics, 2002, Hal. 13.

²¹ Subhan Robihan, *Analisis Manuver Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Sumatera Selatan dalam Putaran Pemilu 2019*, Palembang: Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah, 2021, Hal.15.

Pamungkas menjelaskan bahwa pelebagaan partai politik adalah proses dengan mana organisasi dan tata cara memperoleh nilai baku dan stabil.²² Sedangkan Menurut Randall dan Svasand dikutip oleh Gunawan dan Agung mengatakan bahwa Pelebagaan partai politik adalah proses pemantapan partai politik baik secara struktural maupun secara kultural dalam mempolakan sikap dan budaya (*The process by which the party becomes established in terms of both integrated patterns on behaviour and of attitudes and culture*).²³ Dalam hal ini kelembagaan partai dilihat dari tiga konsep, yaitu:

2.3.1 Konsep Desentralisasi Partai Politik

Desentralisasi adalah sistem pemerintahan yang lebih banyak memberikan kekuasaan kepada pemerintah daerah.²⁴ Desentralisasi dikatakan sebagai penyerahan kekuasaan pemerintahan dari pusat kepada daerah-daerah yang mengurus rumah tangganya sendiri (daerah otonom).²⁵ Implementasi otonomi daerah juga masih menyisakan sejumlah problematika

²² Sigit Pamungkas, *Partai politik teori dan praktik di Indonesia*, Yogyakarta: Institute for Democracy and Welfarism. 2011, Hal.63.

²³ Subhan Agung, Hendra Gunawan, Vol.3 No.1 (2017), *JIPP: Studi Dimensi Value Invasion dan Decisional Autonomy dalam institusionalisasi kepartaian PPP kabupaten Tasikmalaya Pasca Reformasi*, Universitas Siliwangi Tasikmalaya.

²⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *Desentralisasi*, diakses melalui <https://kbbi.web.id/desentralisasi> pada tanggal 9 Februari 2023 pukul 09.25 WITA.

²⁵ Edi Toet Hendratno, *Negara Kesatuan, Desentralisasi, dan Federalisme*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009, Hal. 64.

yang belum tuntas. Salah satunya adalah menyangkut soal Desentralisasi politik dan kewenangan pada ranah partai politik sebagai elemen paling penting masyarakat sipil. Hingga sejauh ini, bukan Cuma politisi daerah bergantung pada dukungan politisi nasional, tetapi perilaku politisi di daerah lebih dipengaruhi “petunjuk” pimpinan partai di pusat daripada diwarnai aspirasi di daerah.²⁶

Demikian pula halnya menyangkut kewenangan (*authority*), menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota pasal 42 poin (4a) dalam hal pendaftaran pasangan calon Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak dilaksanakan oleh pimpinan Partai Politik di tingkat Kabupaten, Kota atau Provinsi, tetapi pendaftaran pasangan calon yang telah disetujui oleh Partai Politik tingkat pusat dan pendaftaran dilakukan oleh pimpinan partai politik tingkat pusat. Hal ini menunjukkan bahwa partai politik di tingkat lokal, pada umumnya hanya diberi kewenangan untuk melakukan proses penjaringan para bakal kandidat; Sementara kendali keputusan penetapan para bakal kandidat itu tetap merupakan kewenangan pusat.²⁷

²⁶ Ahmad Solikhin, Vol.2 No.1 (2017), *Journal of Governance: Pentingnya Desentralisasi Partai Politik di Indonesia*. Lamongan. Hal. 58.

²⁷ Ahmad Solikhin, Vol.2 No.1 (2017), *Journal of Governance: Menimbang Pentingnya Desentralisasi Partai Politik di Indonesia*. Lamongan. Hal. 40

Dinamika yang terjadi didalam desentralisasi partai politik kemudian yang umumnya terjadi seperti walau kandidat sudah diusulkan di tingkat daerah tetapi ternyata dibantah di atas, pimpinan atau pengurus partai politik di level pusat yang pada akhirnya menentukan siapa yang akan terpilih menjadi kandidat partai politik tersebut.

2.3.2 Konsep Pertarungan Elit Partai Politik

Terminologi Elit sebagaimana yang dijelaskan senantiasa menunjuk pada seseorang atau kelompok yang mempunyai keunggulan tertentu, diimana dengan keunggulan yang melekat pada dirinya yang bersangkutan dapat menjalankan peran yang berpengaruh pada cabang kehidupan tertentu.²⁸ Sementara untuk mengidentifikasi peran elite dalam pembuatan kebijakan beberapa ahli seperti Laswell, Mill dan Putnam melihatnya dalam dimensi yang berbeda. Menurut Laswell, elite adalah individu-individu yang meraih nilai-nilai tertinggi dalam masyarakat karena kecakapannya terlibat secara aktif dalam pengambilan kebijakan. Lain halnya dengan Mills yang melihat peran elite dalam kebijakan karena posisi tertinggi individu-individu dalam institusi sedangkan Putnam membaginya dalam dua kategori yaitu elite

²⁸ Haryanto, *Elit Massa dan konflik*, Yogyakarta: Pusat Antar Universitas-Studi Sosial Universitas Gajahmada, 1990, Hal. 6.

yang mempunyai pengaruh langsung dalam proses pembuatan kebijakan dan elite yang pengaruhnya tidak langsung dalam proses pembuatan kebijakan²⁹. Meskipun terdapat banyak pengertian tentang konsep elite namun pada dasarnya ada kesamaan pemahaman bahwa konsep elite merujuk pada suatu kelompok dalam masyarakat yang mempunyai posisi utama dalam struktur masyarakat yang memainkan peranan penting dalam kehidupan masyarakat.³⁰ Apa yang mendorong elite politik atau kelompok-kelompok elite untuk memainkan peranan aktif dalam politik adalah karena menurut teoritis politik (senantiasa) ada dengan kemanusiaan yang tak dapat dihindarkan atau diabaikan untuk meraih kekuasaan. Politik, menurut mereka merupakan permainan kekuasaan dan karena para individu menerima keharusan untuk melakukan sosialisasi serta penanaman nilai-nilai guna menemukan ekspresi bagi pencapaian kekuasaan tersebut.³¹

Putnam menganalisa peran dan pengaruh elite dari perspektif : posisi, reputasi dan pembuatan keputusan. Perbedaan ketiga perspektif antara lain sebagai berikut: Analisa posisi mengandaikan bahwa:

²⁹ Miriam Budiarmo, *Aneka Pemikiran tentang Kuasa dan Wibawa*, Jakarta: Sinar Harapan, 1991, Hal. 34.

³⁰ Jainuri, *Orang Kuat Partai Di Aras Lokal: Blater Versus Lora dalam Percaturan Politik*, Malang: Citra Mentari Press Malang, 2012, Hal. 1.

³¹ SP. Varma, *Teori Politik Modern*, Terj. Yohannes Kristiarto. Dkk. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2001, Hal. 197.

1. Orang yang berkuasa diantara sekelompok elite adalah orang yang menduduki posisi puncak dari organisasi formal tersebut.
2. Kekuasaan berkorelasi sepenuhnya dengan posisi kelembagaan.
3. Analisa posisi merupakan Teknik Analisa yang mudah dan paling umum dipergunakan untuk mengetahui siapakah sebenarnya orang yang berkuasa di Lembaga tersebut.
4. Asumsi analisis ini beranggapan sudah diketahui Lembaga-lembaga mana yang secara politis penting dan Lembaga -lembaga mana yang mempunyai pengaruh semu.
5. Analisa posisi hanya efektif diterapkan dalam kondisi masyarakat/organisasi yang memiliki distribusi kekuasaan yang timpang, sementara dalam masyarakat dan organisasi yang distribusi kekuasaan merata analisis ini tidak efektif.

Singkatnya Analisa ini berasumsi bahwa “siapa menduduki posisi puncak di suatu organisasi, orang itulah yang memiliki peran utama dan mempunyai pengaruh besar dalam gerak organisasi”.³²

Pertarungan Elit Partai Politik menjadi sebuah dinamika dimana jejaring-jejaring Elit Partai Politik terhubung, masing-masing individu elit yang

³² Haryanto, *Kekuasaan Elite: Suatu Bahasan Pengantar*, Yogyakarta: PLOD Universitas Gajahmada, 2005, Hal.134-135.

memiliki pengaruh saling bertemu menentukan arah dan kebijakan Partai politik kedepannya.

2.4 Kerangka berpikir

Pemilihan kepala daerah tahun 2018 di kabupaten Bone, diikuti oleh satu pasangan calon tunggal melawan kotak kosong. Hasilnya, pasangan Calon tunggal Andi Fahsar Padjalangi dan Ambo Dalle keluar sebagai pemenang dengan meraup 63,05% atau 232.955 suara.³³ Sebagai calon Bupati Tunggal Andi Fahsar Padjalangi mampu memenangkan kotak kosong dalam Pilkada kabupaten Bone dengan mendapatkan dukungan dari total keseluruhan 11 Partai Politik. Andi Fahsar Padjalangi yang merupakan tokoh politik yang memulai karirnya sebagai Mantri Polisi Pamong Praja Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone, Camat Kecamatan Cina dan hingga kini beliau telah menduduki jabatan Bupati Bone selama dua periode. beliau terkenal sebagai PNS yang aktif sehingga karirnya terus meningkat sehingga bisa mencalonkan diri sebagai Bupati Bone.

³³ Komisi Pemilihan Umum, “*Penetapan Hasil: Pilkada Kabupaten Bone*”, diakses melalui https://datapemilu.kpu.go.id/pilkada2018/hasil/penetapan/t2/sulawesi_selatan/bone pada tanggal 24 November 2022 pukul 02.53 WITA.

Dinamika Partai Politik pengusung melahirkan sebuah keputusan bahwa Andi Fahsar Padjalangi dan Ambo Dalle mendapat dukungan untuk bisa maju sebagai kandidat di Pilkada dimana pasangan tersebut merupakan calon bupati tunggal pada pemilihan Kepala Daerah kabupaten Bone 2018. Untuk itu penelitian ini mencoba menguraikan analisis Dinamika Internal dan Dinamika Hubungan antara para Partai Politik pengusung melalui dua konsep pelebagaan Partai Politik yaitu Desentralisasi Partai Politik dan Pertarungan Elit Partai Politik dalam Pendekatan Institusionalisme baru sehingga memutuskan memberi dukungan kepada calon Bupati Tunggal yakni Andi Fahsar Padjalangi beserta calon wakilnya Ambo Dalle.

2.5 Skema pemikiran

